

KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
PELATIHAN JARAK JAUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERKINI	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	<p>Peserta mampu meningkatkan kompetensi dalam memahami dan menjelaskan kebijakan perpajakan terkini, meliputi kebijakan terkini di Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Perpajakan Internasional, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Intelijen Perpajakan, Direktorat Keberatan dan Banding, serta Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP). Kompetensi tersebut dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Widyaiswara dan Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN yang mengampu materi perpajakan kepada peserta pelatihan dan/atau mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN.</p>
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p>Berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran Pusdiklat Pajak Tahun 2021, terdapat kebutuhan update materi-materi dan isu-isu perpajakan terkini oleh dosen Politeknik Keuangan Negara STAN. Dalam perkembangannya sesuai hasil rapat-rapat pembahasan kurikulum, kebutuhan ini bukan hanya dibutuhkan dosen Politeknik Keuangan Negara STAN tetapi juga Widyaiswara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak serta Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan yang mengampu materi perpajakan. Seiring dengan dinamika peraturan dan kebijakan perpajakan yang berubah begitu cepat antara lain isu-isu dominan seperti peraturan-peraturan UU Harmonisasi Peraturan</p>

Perpajakan (UU HPP), Undang - Undang Cipta Tenaga Kerja, kebijakan perpajakan pasca pandemi covid-19, Undang – Undang Bea Meterai yang baru, kebijakan terkait penagihan pajak, pemeriksaan berbasis digital, struktur organisasi yang berubah di unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pengawasan kewilayahan, dan kebijakan-kebijakan terkini lainnya, maka para pengajar dan fasilitator di Pusdiklat Pajak dan Balai Diklat Keuangan serta Politeknik Keuangan Negara STAN sudah pasti membutuhkan pembaharuan pengetahuan kebijakan terbaru perpajakan.

Untuk mencapai sasaran strategis dan dimensi kompetensi pegawai Kementerian Keuangan tersebut, maka Pusdiklat Pajak bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) c.q. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Perpajakan Internasional, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Intelijen Perpajakan, Direktorat Keberatan dan Banding, serta Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) menyusun program pembelajaran Pelatihan Jarak Jauh Kebijakan Perpajakan Terkini.

SASARAN (*TARGET LEARNERS*)

Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN Jurusan Pajak dan mengampu materi perpajakan untuk Jurusan non Pajak, Widyaiswara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak dan Widyaiswara Balai Diklat Keuangan yang mengampu materi perpajakan.

MODEL PEMBELAJARAN

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)
- e-Learning*
- Bimbingan di tempat Kerja

- Pelatihan Jarak Jauh
- Magang
- Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta
-

STANDAR KOMPETENSI

1. Memahami Kebijakan Terkini Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak dengan benar;
2. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Peraturan Perpajakan I dengan benar;
3. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dengan benar;
4. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Transformasi Proses Bisnis dengan benar;
5. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Perpajakan Internasional dengan benar;
6. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Peraturan Perpajakan II dengan benar;
7. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dengan benar;
8. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dengan benar;
9. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dengan benar;
10. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan benar;
11. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dengan benar;
12. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Penegakan Hukum dengan benar;

13. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Intelijen Perpajakan dengan benar;
14. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Keberatan dan Banding dengan benar;
15. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dengan benar;
16. Memahami Kebijakan Terkini Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan dengan benar.

KOMPETENSI DASAR

1. Memahami Kebijakan Terkini Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak dengan benar
 - 1.1. Menjelaskan kebijakan rekrutmen SDM Direktorat Jenderal Pajak terkait lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN ke depan dengan benar
 - 1.2. Menjelaskan kebijakan SDM, transformasi dan fungsionalisasi Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tahun 2024 dengan benar
2. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Peraturan Perpajakan I dengan benar
 - 2.1. Menjelaskan Undang - Undang Bea Meterai baru dengan benar
 - 2.2. Menjelaskan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) baru klaster Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan benar
 - 2.3. Menjelaskan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) baru klaster Program Pengungkapan Sukarela dengan benar
 - 2.4. Menjelaskan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) baru klaster Pajak Pertambahan Nilai dan Pemungutan PPN oleh pihak lain sehubungan dengan transaksi dengan Instansi Pemerintah dengan benar
3. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dengan benar
 - 3.1. Menjelaskan penataan struktur organisasi KPP dengan benar

- 3.2. Menjelaskan pembentukan KPP Madya baru dengan benar
- 3.3. Menjelaskan penyesuaian nomenklatur unit dengan benar
4. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Transformasi Proses Bisnis dengan benar
 - 4.1. Menjelaskan kebijakan reformasi perpajakan dengan benar
5. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Perpajakan Internasional dengan benar
 - 5.1. Menjelaskan *Multilateral Instrument* (MLI) dan Pengaturan Konsensus Pemajakan Global (Pasal 32A UU HPP) dengan benar
 - 5.2. Menjelaskan Aspek Perpajakan Internasional dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan benar
 - 5.3. Menjelaskan *Exchange of Information* dan *Assistance in Collection* (Pasal 20A UU HPP) dengan benar
6. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Peraturan Perpajakan II dengan benar
 - 6.1. Menjelaskan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU HPP beserta aturan turunannya mengenai natura dan/atau kenikmatan dengan benar
 - 6.2. Menjelaskan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU HPP beserta aturan turunannya mengenai penghasilan dari usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 23 tahun 2018) dengan benar
7. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dengan benar
 - 7.1. Menjelaskan kebijakan terkait arsitektur informasi dengan benar
 - 7.2. Menjelaskan kebijakan terkait *data governance* dengan benar
8. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dengan benar
 - 8.1. Menjelaskan strategi pengamanan penerimaan perpajakan dengan benar

- 8.2. Menjelaskan kebijakan Wajib Pajak Strategis berdasarkan SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam rangka perluasan basis pajak dengan benar
9. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dengan benar
 - 9.1. Menjelaskan Tata Kelola TIK (Pengembangan, Keamanan, Operasional, dan Layanan) dengan benar
 - 9.2. Menjelaskan *End User Computing* (EUC) dengan benar
 - 9.3. Menjelaskan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) dengan benar
 - 9.4. Menjelaskan Aplikasi DJP saat ini dan peralihan ke Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) dengan benar
 - 9.5. Menjelaskan Peta Jalan Direktorat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Tahun 2022 dengan benar
10. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan benar
 - 10.1. Menjelaskan derik, integrasi aplikasi dan data elektronik dengan benar
 - 10.2. Menjelaskan penagihan pajak atas Wajib Pajak yang terdapat tanda-tanda pailit dan pailit dengan benar
 - 10.3. Menjelaskan pemblokiran akses SABH sebagai kegiatan pendukung penagihan pajak dengan benar
11. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dengan benar
 - 11.1. Menjelaskan penyesuaian identitas DJP pada identitas Kementerian Keuangan Sesuai KMK 617/KMK.01/2020 dan SE 43/PJ/2021 dengan benar
12. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Penegakan Hukum dengan benar
 - 12.1. Menjelaskan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (TPP) dengan benar
 - 12.2. Menjelaskan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan benar
 - 12.3. Menjelaskan Tindak Pidana di Bidang Akses Informasi Keuangan (AIK) dengan benar
 - 12.4. Menjelaskan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan benar

13. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Intelijen Perpajakan dengan benar
 - 13.1. Menjelaskan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-15/PJ/2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan dengan benar
 - 13.2. Menjelaskan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan dengan benar
14. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Keberatan dan Banding dengan benar
 - 14.1 Menjelaskan kompilasi Nota Dinas Penegasan ke Kanwil DJP/KPP (Terkait Penyelesaian Proses Banding dan/atau Gugatan) dengan benar
 - 14.2 Menjelaskan kompilasi *Feeding* (Sebagai Salah Satu Output Proses Evaluasi Putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung) dengan benar
15. Memahami Kebijakan Terkini Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dengan benar
 - 15.1. Menjelaskan kebijakan pengawasan kewilayahan dengan benar
 - 15.2. Menjelaskan kebijakan pendataan dengan benar
 - 15.3. Menjelaskan kebijakan tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan dengan benar
16. Memahami Kebijakan Terkini Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan dengan benar
 - 16.1. Menjelaskan Perubahan Data melalui *contact center* dengan benar
 - 16.2. Menjelaskan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif (NPWP NE) melalui *contact center* dengan benar
 - 16.3. Menjelaskan Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif (NPWP NE) melalui *contact center* dengan benar
 - 16.4. Menjelaskan Layanan *Backend Office* tahun 2021 dengan benar

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Pengajar	Jam Pelajaran			Sekuen/ Urutan
				TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	Kebijakan Terkini Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak	Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur	2	-	2	1
		Kebijakan Terkini Direktorat Peraturan Perpajakan I	Direktorat Peraturan Perpajakan I	4	-	4	2
		Kebijakan Terkini Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur	2	-	2	3
		Kebijakan Terkini Direktorat Transformasi Proses Bisnis	Direktorat Transformasi Proses Bisnis	2	-	2	4
		Kebijakan Terkini Direktorat Perpajakan Internasional	Direktorat Perpajakan Internasional	2	-	2	5
		Kebijakan Terkini Direktorat Peraturan Perpajakan II	Direktorat Peraturan Perpajakan II	4	-	4	6
		Kebijakan Terkini Direktorat Data dan Informasi Perpajakan	Direktorat Data dan Informasi Perpajakan	2	-	2	7
		Kebijakan Terkini Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan	Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan	3	-	3	8
		Kebijakan Terkini Direktorat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Direktorat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	2	-	2	9
		Kebijakan Perpajakan Terkini Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan	Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan	3	-	3	10
		Kebijakan Terkini Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat	2	-	2	11
		Kebijakan Terkini Direktorat Penegakan Hukum	Direktorat Penegakan Hukum	2	-	2	12
		Kebijakan Terkini Direktorat Intelijen Perpajakan	Direktorat Intelijen Perpajakan	2	-	2	13
		Kebijakan Terkini Direktorat Keberatan dan Banding	Direktorat Keberatan dan Banding	2	-	2	14

	Kebijakan Terkini Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	3	-	3	15
	Kebijakan Terkini Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	2	-	2	16
TOTAL JP			39			
DILAKSANAKAN DALAM			5 hari			

Keterangan:

- Pembelajaran ini dilakukan dengan metode pelatihan jarak jauh yang memanfaatkan berbagai platform atau media pembelajaran yaitu: *zoom meeting* sebagai media utama pelatihan jarak jauh (dapat dilakukan di *main room* atau *breakout room*), *google forms/google docs* untuk pelaksanaan *pre-test* dan *post-test*, *google spreadsheet/google docs/google drive/slide powerpoint* untuk diskusi/paparan presentasi kelompok atau *sharing session*, dan aplikasi pendukung pelatihan jarak jauh lainnya.
- Dalam hal dibutuhkan asisten pengajar, maka pembelajaran dapat diselenggarakan secara asistensi.

JENIS DAN JENJANG PROGRAM

Pelatihan Jarak Jauh Tingkat Lanjutan

PERSYARATAN PESERTA

Administrasi

1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan
2. Menjabat sebagai Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, atau
3. Menjabat sebagai Widyaiswara, khususnya Widyaiswara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak dan Widyaiswara Balai Diklat Keuangan

Kompetensi

1. Memiliki latar belakang atau kompetensi perpajakan
2. Untuk Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, diprioritaskan Dosen Jurusan Pajak dan Jurusan Non Pajak yang mengampu materi perpajakan
3. Untuk Widyaiswara Balai Diklat Keuangan, diprioritaskan Widyaiswara berlatar belakang atau kompetensi perpajakan
4. Membutuhkan pemahaman update peraturan atau kebijakan terkini perpajakan

KUALIFIKASI PENGAJAR

Umum

1. mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang baik kepada peserta;
2. mempunyai pengalaman mengajar;
3. menguasai materi yang akan diajarkan;
4. memiliki keahlian teknis tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan.

Khusus

1. Telah mengikuti kegiatan penyamaan materi calon pengajar, atau;
2. Telah ditugaskan/ditunjuk oleh pimpinan unit asal direktorat/sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

BENTUK EVALUASI**EVALUASI LEVEL 1**

1. Evaluasi Pengajar (ada/~~tidak~~).
Catatan: evaluasi pengajar oleh peserta.
2. Evaluasi Penyelenggaraan (ada/~~tidak~~).
Catatan: evaluasi penyelenggaraan oleh peserta.

EVALUASI LEVEL 2

- Bentuk evaluasi peserta adalah *Pre-test* dan *Post-test*.

Sertifikat

- Peserta pelatihan yang memenuhi syarat akan diberikan sertifikat Pelatihan Jarak Jauh Kebijakan Perpajakan Terkini.

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

- 1) Materi/Bahan Ajar
- 2) Rencana *Rundown* Kegiatan/*Session Plan*
- 3) Internet

- 4) Fasilitas khusus yang diperlukan pengajar meliputi:
Ruang khusus bagi pengajar yang dilengkapi *microphone*, laptop, layar, infokus dan peralatan pendukung mengajar lainnya)
- 5) Lain-lain
Program dirancang sedemikian rupa agar dapat berkontribusi terhadap kinerja unit dengan metode pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini menggunakan pembelajaran *online (virtual learning)* dengan menggunakan multiple Platform (Zoom, WA Group, Google Sheet, Google Docs, Kahoot, atau platform lainnya)
Pembelajaran ini dilakukan selama 5 hari kerja, dimana peserta dan pengajar melakukan tatap muka di kelas dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peserta akan menerima materi pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
 - b. Proses pembelajaran jarak jauh akan diselenggarakan dengan metode:
 - Pemaparan materi oleh pengajar
 - Diskusi/tanya jawab

Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program Pelatihan Jarak Jauh Kebijakan Perpajakan Terkini

Tim Penyusun:

No.	Nama Pengelola Program Pelatihan	Instansi	Struktur Tim Pengelola Program Pelatihan
1.	I Wayan Sukada	Pusdiklat Pajak BPPK	Ketua
2.	Suwadi	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota
3.	Dika Arifiani	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota

Keterangan	
Awal	KAP yang disahkan pada tanggal 1 Desember 2020
Revisi 1	Berdasarkan Rapat Pembahasan Kurikulum PJJ Kebijakan Perpajakan Terkini tanggal 24 November 2021 dan 9 Desember 2021

Jakarta, 10 Desember 2021
Kepala Pusdiklat,



Ditandatangani secara elektronik
Hario Damar